

Harmonisasi Sebagai Fondasi Etika Kerukunan Beragama: Studi Kasus Desa Pancasila Balun Lamongan

Harmonization as the Foundation of Religious Harmony Ethics: A Case Study of Pancasila Village, Balun, Lamongan

Annisaa' Fitri Aprillia^{a*}, Dewa Agung Gede Agung^b

^{a,b}Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

*Corresponding email: annisaa.fitri.2507318@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Received: December 11, 2025

Revised: April 29, 2026

Accepted: May 20, 2026

Published: June 30, 2026

Permalink/DOI

10.17977/um020v20i12026p1-18

Copyright © 2026.

Sejarah dan Budaya

Email: jsb.journal@um.ac.id

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Aprillia, A., & Agung, D. (2026). Harmonisasi Sebagai Fondasi Etika Kerukunan Beragama: Studi Kasus Desa Pancasila Balun Lamongan. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 20(1), 1-18. <https://doi.org/10.17977/um020v20i12026p1-18>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

This study aims to analyze social harmonization as the foundation of religious harmony ethics in Pancasila Village, Balun, Lamongan. Amidst rising intolerance conflicts, Balun Village presents a positive anomaly where Muslims, Christians, and Hindus coexist peacefully. This study employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis used Miles and Huberman's interactive model. The results show that: (1) The foundation of harmony ethics is formed from the historical legacy of Mbah Alun and the collective experience of the 1965 event, which strengthened citizens' emotional bonds; (2) Social ethics are developed based on local wisdom values such as "tepo seliro" and "Tri Hita Karana"; and (3) Concrete practices of tolerance are reflected in cross-religious participation in rituals and social cooperation. In conclusion, harmony in Balun Village is not merely passive tolerance but an active social ethic institutionalized within the community's cultural structure.

KEYWORDS

Pancasila Village, Social Ethics, Religious Harmony, Multiculturalism, Tolerance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi sosial yang menjadi fondasi etika kerukunan beragama di Desa Pancasila, Balun, Lamongan. Di tengah maraknya konflik intoleransi, Desa Balun menunjukkan anomali positif di mana umat Islam, Kristen, dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Fondasi etika kerukunan terbentuk dari warisan sejarah tokoh Mbah Alun dan pengalaman kolektif peristiwa 1965 yang memperkuat ikatan emosional warga; (2) Etika sosial masyarakat dikembangkan berlandaskan nilai kearifan lokal seperti *tepo seliro* dan ajaran *Tri Hita Karana*; serta (3) Praktik nyata toleransi tecermin dalam partisipasi lintas agama pada ritual ibadah dan gotong royong sosial. Kesimpulannya, harmoni di Desa Balun bukan sekadar toleransi pasif, melainkan bentuk etika sosial aktif yang melembaga dalam struktur budaya masyarakat.

KATA-KATA KUNCI

Desa Pancasila; Etika Sosial; Kerukunan Beragama; Multikulturalisme; Toleransi.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman yang sangat kaya, baik dalam hal budaya, agama, bahasa, suku, etnis, maupun tradisi lokal (Antara & Yogantari, 2018). Keberagaman tersebut merupakan salah satu kekuatan utama Indonesia, karena memungkinkan lahirnya berbagai inovasi budaya, bentuk seni, dan praktik sosial yang unik. Namun, disisi lain Qolby dan Kholifah (2025) menyatakan bahwa keberagaman yang tinggi menghadirkan tantangan serius bagi integrasi sosial dan stabilitas masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan agama, adat, dan tradisi dapat menjadi sumber konflik yang merusak keharmonisan dan rasa saling percaya di antara masyarakat.

Kerukunan beragama bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga fondasi utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis (Gani dkk., 2024). Kerukunan yang stabil memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam pembangunan menjaga ketertiban, dan mengembangkan potensi lokal secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Kharis (2022) menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu mempertahankan kerukunan beragama cenderung memiliki kualitas hidup lebih baik, tingkat kriminalitas lebih rendah, dan kapasitas kolektif yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan sosial maupun tekanan eksternal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau (2024) dialog antaragama dalam penyelesaian perselisihan mampu menciptakan toleransi dalam masyarakat majemuk, hal ini merupakan solusi yang sangat efektif dalam membangun kehidupan Masyarakat agar terciptanya kerukunan didalam umat yang berbeda (Malau, 2024).

Meskipun kerukunan adalah kondisi ideal yang diharapkan, realitas di lapangan sering kali menunjukkan fenomena yang kontradiktif. Di berbagai wilayah di Indonesia, perbedaan keyakinan masih sering menjadi sumbu pemicu konflik horizontal. Beberapa studi mencatat maraknya kasus intoleransi, seperti penolakan pendirian rumah ibadah di Cilegon yang dikenal sebagai kasus kota tanpa Gereja (Riansyah dkk., 2021). Selain itu, insiden pembubaran paksa aktivitas peribatan di Lampung, hingga perusakan tempat ibadah di Tanjung Balai menjadi bukti bahwa gesekan antarumat beragama masih sangat rentan terjadi (Surya & Efendi, 2025). Konflik-konflik ini tidak hanya menyisakan trauma sosial tetapi juga memperlebar jarak hubungan antarwarga yang berbeda keyakinan. Fenomena intoleransi bahkan tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga tercatat di wilayah perkotaan yang seharusnya lebih modern dan terbuka. Studi di kota-kota seperti Bogor dan Bantul menunjukkan adanya gejala segregasi sosial akibat sentimen agama semakin menguat (Setiabudi dkk., 2022). Kondisi disharmoni ini sangat memprihatinkan karena berbanding terbalik dengan cita-cita Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model nyata tentang bagaimana sebuah Masyarakat majemuk dapat mengelola perbedaan tersebut menjadi kekuatan sosial bukan perpecahan.

Kondisi konflik dan intoleransi tersebut berbanding terbalik dengan keharmonisan yang ditemukan di Desa Pancasila, Balun, Lamongan. Desa Balun dikenal dengan desa Pancasila karena masyarakat desa tersebut terdiri dari pemeluk tiga agama utama yaitu Islam, Kristen dan Hindu (Wahyuddin dkk., 2022). Masyarakat Desa Balun hidup berdampingan secara damai dan profuktif, menjadikannya model toleransi dan integrasi sosial yang patut dicontoh di tingkat nasional. Harmoni di Desa Balun bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan sejarah panjang yang membentuk toleransi aktif,

bukan sekedar toleransi pasif (Huda, 2022). Berdasarkan hasil observasi fenomena sosial di Desa Balun menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dan moral berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat relasi antarindividu lintas latar belakang yang berbeda. Dalam konteks masyarakat multikultural, etika sosial menjadi landasan penting untuk membangun kehidupan yang berkeadaban. Dimana sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan gotong royong menjadi norma sosial yang dijaga bersama (Mawardi dkk., 2024). Pendidikan nilai dan multikulturalisme menjadi instrumen strategis dalam membentuk karakter masyarakat yang toleran dan humanis (Sihombing dkk., 2024). Konteks ini nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi menjadi pedoman normatif dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam membangun etika relasi antarwarga. Pancasila mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat (Malik dkk., 2024). Sehingga menjadi pondasi etika sosial yang kokoh dalam menghadapi tantangan disintegrasi akibat perbedaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena kerukunan di Desa Balun dari berbagai perspektif. Wahyuddin dkk., (2022) menyoroti praktik kerukunan melalui jalur pendidikan formal dengan mengkaji peran MI Tarbiyatus Sibyan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi milenial. Sementara itu, Alfariq, (2021) menelaah kerukunan dari sudut pandang filosofis dan menemukan bahwa toleransi di Desa Balun bertumpu pada nilai-nilai instrumental, nilai sosial, serta komitmen moral sebagai upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dari perspektif ilmu komunikasi, Rozi & Utomo, (2019) mengungkapkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap keberagaman berlangsung secara positif karena didukung oleh kuatnya ikatan kekeluargaan serta kesadaran kolektif yang berkembang di tengah masyarakat. Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut masih berfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti peran lembaga pendidikan, landasan nilai, maupun penerimaan sosial terhadap pluralisme. Belum banyak kajian yang secara komprehensif menjelaskan bagaimana praktik sosial, nilai-nilai filosofis Pancasila, dan budaya masyarakat saling berinteraksi hingga membentuk suatu struktur etika yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari celah penelitian tersebut (*research gap*), penelitian ini berupaya menggali secara mendalam konseptualisasi harmonisasi sebagai fondasi etika kerukunan beragama (*living ethics*) yang tumbuh, berkembang, dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Balun.

Berdasarkan paparan dinamika sosial, tinjauan literatur tersebut, maka peneliti berfokus pada 1) bagaimana warisan Sejarah dan budaya lokal membentuk fondasi etika kerukunan di Desa Balun 2) Apakah bentuk etika sosial yang dikembangkan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keilmuan 3) Dalam keseharian, perbuatan atau sikap nyata apa yang warga Desa Balun lakukan untuk menunjukkan bahwa mereka saling menghormati dan menjaga kerukunan. Dengan hal itu, tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memahami bagaimana warisan sejarah dan budaya lokal membentuk etika kerukunan di Desa Balun, mengidentifikasi bentuk etika sosial yang berakar pada nilai-nilai keilmuan, serta menggambarkan praktik nyata masyarakat dalam menjaga toleransi dan keharmonisan antarumat beragama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena kehidupan toleransi di Desa Pancasila dalam konteks yang sesuai dengan keadaan lapangan tanpa adanya intervensi dari penelitian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014) dalam buku Leavy bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan (Leavy, 2022). Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, yang dikenal sebagai “Desa Pancasila” yang memiliki karakteristik unik berupa keberadaan tiga tempat ibadah (masjid, gereja, dan pura) yang berdiri berdampingan dalam satu desa.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu bahwa informan tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan (Sugiyono, 2008). Subjek dalam penelitian ini meliputi: (1) Perangkat Desa sebagai pemegang otoritas struktural dan kebijakan; (2) Tokoh Agama Hindu, Tokoh Agama Kristen, dan Juru Kunci Mbah Alun; (3) Warga masyarakat lintas agama untuk melihat praktik kerukunan sehari-hari secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif terhadap kegiatan keagamaan dan interaksi sosial warga, wawancara mendalam untuk menggali perspektif subjek mengenai etika kerukunan, serta dokumentasi berupa arsip desa dan foto kegiatan yang relevan. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dkk., (2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: (1) kondensasi data (*data condensation*), yakni proses memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data kasar dari lapangan; (2) penyajian data (*data display*), yakni menyusun informasi dalam bentuk teks naratif yang sistematis agar mudah dipahami; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yakni memaknai data untuk menjawab rumusan masalah. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan informasi yang diperoleh dari satu informan dengan informasi dari informan lainnya. Atau jika dijabarkan pertama, tahap kondensasi data (*data condensation*) di mana penulis memilah dan memfokuskan hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi terkait kerukunan di Desa Balun, kemudian mereduksi informasi yang tidak relevan dengan tema etika kerukunan. Kedua, tahap penyajian data (*data display*), dimana data yang telah dipilah disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis, kategori tema etika, serta matriks hubungan antarumat beragama untuk mempermudah pemahaman alur harmonisasi. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yaitu melakukan pemaknaan mendalam terhadap data yang disajikan guna merumuskan konseptualisasi harmonisasi sebagai fondasi etika. Kesimpulan awal yang didapat senantiasa diverifikasi ulang selama penelitian berlangsung agar tetap valid. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan informasi yang diperoleh dari satu informan (seperti tokoh agama) dengan informasi lainnya (seperti masyarakat awam dan perangkat desa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Warisan Sejarah Dan Budaya Lokal Membentuk Fondasi Etika Kerukunan Di Desa Balun

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fondasi etika kerukunan di Desa Balun bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses sejarah yang panjang serta internalisasi nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat. Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa harmoni di Balun tidak bisa dilepaskan dari sejarah pendiriannya. Sejak awal, masyarakat menanamkan prinsip hidup bersama berdampingan yang kemudian diwariskan turun-temurun. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ola & Keban (2023) yang menyatakan Masyarakat Lamaholot yang senantiasa menjunjung tinggi perbedaan dan menjaga nilai-nilai persatuan dalam kebudayaan etnik mereka dan tradisi tersebut menjadi simbol persatuan masyarakat multikultural yaitu Gemohing.

1. Figure Mbah Alun Sebagai Simbol Persatuan

Secara historis, masyarakat Balun menyakini bahwa awal mula kerukunan antarumat beragama di desa ini tidak terlepas dari sosok Mbah Alun. Berdasarkan pemaparan Juru Kunci Makam Mbah Alun, beliau adalah tokoh sentral:

“Mbah Alun memiliki nama asli yaitu Raden Santi Brata Wasesa, seorang tokoh penyebar islam yang menjunjung nilai toleransi dan kebijaksanaan, selama hidupnya ajaran moral dan spiritual menjadi simbol persaudaraan antarumat hingga kini makam mbah alun masih diziarahi warga dari berbagai agama bahkan Masyarakat luar balun sebagai lambing penghormatan atas nilai-nilai yang diwariskan, tapi kalau paling rame itu jum’at kliwon”. (Wawancara dengan Juru Kunci, 2025)

Pernyataan tersebut mengungkapkan betapa jiwa nasionalisme dan toleransi yang dimiliki Mbah Alun sangat tinggi, dan pandangan muncul bahwa balun sejak awal merupakan tanah damai yang mempersatukan, bukan memisahkan, perbedaan keyakinan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2016) pola dakwah kultural seperti ajaran toleransi juga diajarkan oleh Sunan Kalijaga, tidak hanya itu Sunan Kalijaga menanamkan nilai *amar ma’rif nahi munkar*, hidup sederhana.

2. Dinamika Pasca-1965 dan Peran Tokoh Pak Bati

Selain faktor leluhur, momen sejarah penting lainnya adalah pasca peristiwa G30S/PKI. Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen (STS) memperkaya pemahaman tentang perjalanan identitas sosial Balun. Beliau mengungkapkan bahwa keberadaan agama Kristen dan Hindu secara resmi muncul sekitar tahun 1967 sebagai respons terhadap situasi politik saat itu. STS menuturkan secara detail:

“...masa itu menjadi periode kelam karena banyak warga hidup dalam ketakutan dan kehilangan arah. Dalam situasi itu, muncul peran penting seorang putra Balun asli... Namanya Pak Bati. Pak Bati awalnya tugas di Sulawesi... kemudian disuruh kembali ke Balun karena Balun pada saat itu belum aman. Akhirnya Pak Bati mencalonkan diri menjadi Kepala Desa... suara Pak Bati 95% lebih unggul. Karena Pak Bati punya peran dan andil yang besar di desa tersebut dan pada masa kepemimpinannya itu

nasionalis, maka masyarakat tertarik dan mengikuti agama Pak Bati. Begitupun orang-orang yang sakit gatal, sakit perut, atau ingin masuk Kristen dibaptis di kolam Pak Bati yang sakit akan sembuh". (Wawancara dengan STS, Tokoh Agama Kristen, 2025)

Kutipan diatas menunjukkan besarnya pengaruh figure pemimpin dalam membentuk keyakinan warga. Sikap pemimpin yang berjiwa nasionalis seperti Pak Bati memberikan rasa aman yang dibutuhkan warga Balun. Hal ini memperkuat pendapat Susi dkk., (2024) yang menyebutkan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin memberikan dampak yang cukup besar kepada masyarakatnya, begitupun sikap yang dimiliki berjiwa nasionalis. Pemimpin harus memiliki dasar kepemimpinan yang nasionalis dan berjiwa Pancasila untuk investasi masa depan.

Uniknya, masuknya agama baru ini tidak menimbulkan gesekan. Hal ini dikonfirmasi oleh Tokoh Agama Hindu (TD):

"Hindu dan Kristen masuk ke Desa Balun beruntutan, tapi Kristen dulu lalu Hindu sama di tahun 67. Pada saat itu kepala desa memperbolehkan masuk agama apa saja yang terpenting agama yang disahkan oleh pemerintah." (Wawancara dengan TD, Tokoh Agama Hindu, 2025)

Pak GR (Perangkat Desa) menambahkan bahwa Keputusan memilih agama resmi saat itu adalah strategi bertahan hidup pada sesepuh yang sebelumnya menganut kepercayaan, namun tetap koridor kerukunan:

"...waktu itu pemerintah melarang, tidak dilegalkan untuk menganut agama yang tidak disahkan oleh pemerintah... sesepuh kami pada waktu yang kepercayaan itu masuklah agama Hindu, karena ajarannya itu masih identik ajaran sebelumnya." (Wawancara dengan GR, 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin dkk., (2022) menjelaskan desa yang memiliki lebih dari satu agama yang bisa hidup rukun antaragama di Masyarakat, para peneliti luar balun menyebutnya desa Pancasila dengan 4700 warga sudah menanamkan prinsip kerukunan dan ikatan toleransi sekian lama bahkan konsisten (Wahyuddin dkk., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin dkk., (2022) menjelaskan desa yang memiliki lebih dari satu agama yang bisa hidup rukun antaragama di masyarakat, para peneliti luar Balun menyebutnya desa Pancasila dengan 4700 warga sudah menanamkan prinsip kerukunan dan ikatan toleransi sekian lama bahkan konsisten. Keberagaman agama ini tidak menjadi halangan besar, malah dari perbedaan menjadikan Desa Balun sangat kuat. Bahkan hubungan antarwarga yang berbeda agama semakin kuat karena saling membantu dan menjaga satu sama lain. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amani dkk., (2024), pluralisme agama merupakan realitas kompleks dalam masyarakat modern yang mengelola keragaman tersebut melalui konsep sosiologi agama yang menjadikan harmonis.

3. Internalisasi Identitas "Desa Pancasila" dan Nilai Kearifan Lokal

Identitas sebagai Desa Pancasila rupanya bukan klaim sepihak. Pak STS menjelaskan bahwa julukan tersebut baru dikenal dalam 25 tahun terakhir:

“...banyak peneliti dan wartawan yang menyebut Balun sebagai “Desa Indonesia Mini” atau “Desa Pancasila” karena di satu wilayah kecil terdapat tiga rumah ibadah yang berdampingan... hingga pemerintah daerah turut meresmikannya dengan membangun gapura... Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap nilai-nilai Pancasila di Balun datang dari luar, namun diterima dengan bangga oleh masyarakat sebagai cerminan identitas mereka.” (Wawancara dengan STS, 2025)

Julukan ini diterima karena selaras dengan nilai kearifan lokal yang dianut warga. Tokoh Agama Hindu (TD) menjelaskan landasan filosofis kerukunan tersebut melalui konsep *Tri Hita Karana*:

“Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana... Pertama, hubungan dengan Tuhan atau Parahyangan... Kedua, hubungan dengan sesama manusia atau Pawongan, yang menekankan pentingnya saling menghormati, memahami perbedaan, dan memanusiakan manusia (*nguwongno uwong*)... Ketiga, hubungan dengan lingkungan atau Palemahan... Jika ketiga hubungan ini dijaga dengan seimbang, maka kebahagiaan akan hadir secara alami.” (Wawancara dengan TD, 2025)

Nilai-nilai *nguwongno uwong* (memanusiakan manusia) dan *tepo seliro* inilah yang menjadi perekat sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Winy (2025) bahwa penerapan nilai kearifan lokal mampu menyelesaikan konflik intoleransi. Dengan demikian, warisan Sejarah desa balun tidak hanya berasal dari tokoh spiritual masa lampau, tetapi juga dari pengalaman sosial modern yang meneguhkan arti pentingnya toleransi. Nilai-nilai yang tumbuh dari budaya, spiritualitas, dan pengalaman Sejarah membentuk identitas komunal Masyarakat balun yang inklusif. Dari masa kelam hingga akhirnya dikenal luas sebagai desa Pancasila, balun terus menunjukkan ketagguhannya dalam menjaga harmoni. Kini, kerukunan bukan sekedar semboyan melainkan cerminan dari perjalanan Panjang Masyarakat yang belajar dari Sejarah, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai damai sebagai warisan bagi generasi berikutnya.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Agustian (2019) tentang pendidikan multikultural, bahwa kesadaran keberagaman yang sejati tumbuh ketika masyarakat tidak hanya mengenali perbedaan, tetapi juga membangun nilai bersama melalui pengalaman sosial dan budaya lokal (Agustian, 2019). Dalam konteks balun, pengalaman historis mulai dari warisan Mbah Alun hingga peristiwa kelam serta pengakuan eksternal sebagai Desa Pancasila telah bertransformasi menjadi etika sosial yang hidup seperti menghormati keyakinan orang lain, menjaga harmoni, dan menegakkan prinsip keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut mempresentasikan praktik nyata dari *multicultural understanding* dan *social ethics*, dimana kerukunan bukanlah hasil penyeragaman, tetapi hasil dialog budaya yang berlangsung lintas waktu dan lintas iman.

B. Bentuk Etika Sosial Yang Dikembangkan Masyarakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keilmuan

Suasana Desa Balun terasa tenang, meskipun suara-suara kegiatan keagamaan saling bergantian, begitu pun kegiatan yang dilakukan oleh desa. Tiga tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, dan pura, berdiri berdekatan. Pemandangan itu memperlihatkan harmoni yang tidak

dibuat-buat. Berdasarkan keterangan juru kunci makam Mbah Alun, tokoh yang dipercaya sebagai pendiri desa, ajaran beliau menekankan pentingnya hidup rukun dan saling membantu tanpa memandang agama.

“Mbah Alun itu ngajari orang Balun supaya jadi saudara semua, gak usah lihat agamanya”.



Gambar. 1 Pura dan Masjid

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Etika sosial masyarakat Desa Balun dibangun di atas nilai-nilai budaya, ajaran agama dan pengalaman sosial yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dasar ini berkembang menjadi pedoman moral yang diwariskan secara turun-temurun dan diinternalisasikan melalui kebiasaan sosial warga. Dengan demikian, etika sosial masyarakat balun tidak lahir dari peraturan formal, melainkan dari proses historis dan refleksi budaya yang panjang.

1. Budaya Sebagai Ruang Netral

Menurut hasil wawancara dengan Pak GR selaku warga Balun, beliau menegaskan bahwa masyarakat Balun menjunjung tinggi nilai budaya sebagai “Payung Bersama” dalam kehidupan sosial. Beliau menjelaskan budaya menjadi dasar dalam membangun keharmonisan ditengah perbedaan keyakinan.

“Fanatik boleh, tapi untuk agamanya sendiri. Kalau di masyarakat ya harus plural.”
(Wawancara dengan GR, 2025)

Ujaran Pak GR tersebut menggambarkan adanya kesadaran sosial yang matang, di mana religiusitas dipahami sebagai ruang personal, sementara kehidupan sosial diikat oleh prinsip kebersamaan dan saling menghargai. Etika seperti ini mencerminkan tahap perkembangan moral masyarakat yang menempatkan toleransi dan empati sebagai dasar interaksi. Pancasila menjadi persatuan, panacsila juga menjadi landasan berperilaku, bertindak, sehingga terciptanya kehidupan yang rukun, damai dan Sejahtera (Fraulen dkk., 2022).

2. Mekanisme *Tepo Seliro* dan Nteralitas Kepemimpinan

Etika sosial juga diwujudkan dalam bentuk aturan tidak tertulis yang dijaga Bersama. Warga memhami batas sopan santun melalui prinsip *tepo seliro* (tenggang rasa) dan *ewuh pakewuh* (sungkan terhadap orang lain). Nilai ini tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti saling

menyesuaikan waktu kegiatan keagamaan atau menghindari pembicaraan yang berpotensi menyinggung keyakinan lain. Kebiasaan tersebut memperlihatkan bagaimana norma budaya berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan antarwarga. Dengan kata lain, harmoni di Balun tidak dibangun melalui doktrin agama semata, tetapi melalui pemahaman Bersama terhadap etika sosial yang bersifat kontekstual. Seperti yang diungkapkan oleh Pak GR terkait peran pemimpin desa:

"Lah acara-acara ini juga dipikirkan oleh pak kades berunding dengan perangkat desa dan 3 tokoh agama, BPD, menentukan tema juga sangat dipikirkan biar tidak ada yang tersinggung atau bergesekan. Mangkanya jadi kades disini harus benar-benar netral karena kultur di desa balun ini seperti ini". (wawancara dengan GR, 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin benar-benar mempertimbangkan setiap tindakan agar tidak memihak salah satu agama. Perangkat desa telah melakukan pelayanan publik dengan kinerja yang professional (Alfian, 2019). Begitu pun ketika warga minoritas (Kristen dan Hindu) bermusyawarah, suara mereka pasti akan didengar. Seperti ungkapan Pak STS dan Pak TD:

"Meskipun minoritas, di sini kalaupun berpendapat atau mengusulkan apa tetap didengar karena kita keluarga. Kalau sudah kumpul tidak memandang latar belakang, fokus pada apa yang akan dibahas." (Wawancara dengan STS & TD, 2025)

3. Internalisasi Nilai *Tri Hita Karana*

Sementara itu, tokoh agama Hindu (TD), menegaskan bahwa masyarakat Balun mampu menerapkan ajaran *Tri Hita Karana* dalam kehidupan sehari-hari, yakni menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Menurutnya, warga non-Hindu memahami nilai tersebut secara implisit melalui perilaku saling menghormati.

"Kalau Nyepi, warga lain sudah tahu untuk menjaga ketenangan tanpa harus diminta." (Wawancara dengan TD, Tokoh Agama Hindu, 2025)

Praktik semacam ini memperlihatkan adanya pengetahuan sosial kolektif yang lahir dari proses interaksi antarkelompok keagamaan secara terus-menerus. Pedoman penting dalam menumbuhkan toleransi dan perdamaian ditengah keberagaman keyakinan, nilai yang terkandung di dalamnya perlu dihayati dan diamalkan agar semangat toleransi semakin mengakar dalam kehidupan Masyarakat. Oleh karena itu, adanya budaya perlu dilestarikan melalui Pendidikan dan kebijakan lokal sebagai wujud kearifan dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama (Kebing dkk., 2024).

4. Tinjauan Teoritis dari Kohlberg dan Geertz

Dalam pandangan Pak STS, etika sosial di Balun juga terbentuk melalui kebiasaan bermusyawarah dan gotong royong. Masyarakat menempatkan dialog dan mufakat sebagai cara utama dalam menyelesaikan perbedaan. Ia menuturkan bahwa pengalaman masa lalu, terutama peristiwa 65 telah menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kerukunan.

"Kalau ada masalah, kita selesaikan di desa, jangan sampai keluar," (wawancara dengan STS, 2025).

Prinsip ini menegaskan bahwa etika sosial di Balun berpijak pada tanggung jawab bersama untuk mempertahankan kedamaian sosial. Dari perspektif keilmuan, bentuk etika sosial masyarakat Balun dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teoritis. Perkembangan Moral Sigiro (2018) menjelaskan bahwa moralitas tertinggi muncul ketika individu mampu menilai tindakan berdasarkan prinsip keadilan universal dan empati sosial, sebagaimana tampak pada perilaku warga Balun yang mengutamakan penghormatan dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Antropologi Budaya Dewayani (2017) melalui konsep *thick description* menunjukkan bahwa tindakan sosial masyarakat selalu dipandu oleh sistem makna budaya yang mendalam (Dewayani, 2017). Dalam konteks Balun, nilai-nilai seperti *tepo seliro*, *guyub rukun*, dan *Tri Hita Karana* menjadi struktur pengetahuan sosial yang membentuk kesadaran etis warga. Dengan demikian, etika sosial di Balun merupakan hasil sintesis antara pengalaman historis, kearifan lokal, dan pembelajaran keilmuan yang berkelanjutan.

C. Sikap Nyata Dalam Kehidupan Sehari-Hari Yang Membuat Warga Desa Balun Lakukan Untuk Menunjukkan Bahwa Mereka Saling Menghormati Dan Menjaga Kerukunan

Fokus dari topik ini adalah untuk melihat sikap nyata apa yang warga Desa Balun lakukan untuk menunjukkan bahwa mereka saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat bagaimana warga mempraktikkan kerukunan, salah satu contoh utamanya adalah melalui kegiatan desa yang melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan ini sengaja dirancang bersama agar tidak memihak satu agama saja dan semua bisa terlibat. Masyarakat dari tiga agama yang berbeda telah menjadikan toleransi sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang melekat. Hal ini dijelaskan pak GR, seorang warga sekaligus perangkat desa.

“Kalau di Balun ini sudah biasa saling bantu. Misalnya pas umat Hindu mau upacara, warga Islam ikut bantu bersih-bersih atau nyiapin tenda. Begitu juga sebaliknya, waktu Idul Adha, umat Kristen dan Hindu ikut bantu potong hewan atau bagikan dagingnya. Jadi sudah jadi kebiasaan, gak perlu disuruh. Contoh lagi sedekah bumi, dilakukan selama 3 hari, pertama itu dilakukan umat hindu berdoa dengan caranya sendiri, kemudian dari ke 2 dilakukan oleh umat kristianai, lalu hari ke 3 dilakukan oleh umat muslim, hari ke 3 menjadi puncak acara semua masyarakat hadir.... Lah acara-acara ini juga dipikirkan oleh pak kades berunding dengan perangkat desa dan 3 tokoh agama, BPD, menentukan tema juga sangat dipikirkan biar tidak ada yang tersinggung atau bergesekan, seperti nama Tuhan adalah nama yang paling netral di 3 agama.” (Wawancara GR, November 2025)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa praktik gotong royong menjadi wadah nyata bagi Masyarakat untuk memelihara harmoni sosial. Bentuk toleransi yang paling jelas terlihat adalah saat perayaan hari besar keagamaan. Warga dari agama lain secara sukarela dan otomatis berpartisipasi, terutama dalam menjaga keamanan, agar ibadah saudara mereka yang berbeda keyakinan dapat berjalan dengan khusyuk. Pak TD seorang tokoh agama hindu, menceritakan pengalaman ini:

“.....di islam ada sholat idul fitri ada sholat idul adha masjid itu tidak cukup karena islam disini banyak jadi sampai ke lapangan sholatnya, dari pihak hindu dan pemuda Kristen juga membantu untuk mengamankan sepeda atau apa biar sholatnya khusyu’, khidmat, dan tenang karena saling melindungi dan menjaga.” (TD, November 2025).

Sikap saling membantu ini juga berlaku sebaliknya. Saat umat hindu melaksanakan perayaan seperti pawai ogoh-ogoh, para pemuda dari agama Kristen, islam bahkan karang taruna atau Masyarakat lain juga ikut turun tangan mengamankan. Pak TD menambahkan:

“islam, Kristen juga membantu, pada waktu pelaksanaan itu keamanannya, bahkan kadang sampai ikut membopong.... keamanan ogoh-ogoh itu terjaga oleh pemuda Kristen dan islam, karang taruna, Masyarakat lain, dikawal. Tanpa meminta, tanpa mengumumkan mereka semua datang entah dari pemuda gereja, pemuda masjid, semua ikut membantu....” (TD, November 2025)



Gambar 2. Ogoh-Ogoh Desa Balun
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2024)



Gambar 3. Prosesi Ogoh-Ogoh Desa Balun
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2024)

1. Solidaritas dalam Kedudukan dan Simbol Peci Hitam

Rasa persaudaraan yang kuat juga ditunjukkan saat ada warga yang mengalami kedukaan atau meninggal dunia. Menurut pak GR saat momen seperti ini, perbedaan agama seakan hilang. Semua warga membaur untuk membantu prosesi pemakaman.

“semua akan membantu, bahkan semisal ada orang meninggal itu tidak tahu yang melayat itu orang Kristen, hindu, islam karena semua berpakaian sama menggunakan peci hitam, semua begitu... jadi yang ikut mengantarkan sampai dengan selesai semua warga balun”. (wawancara GR, 2025).

Selaras dengan jawaban dari pak TD juga mengatakan:

“Jadi kalau sudah membaur bahkan dari hindu, islam budha ga ada yang tau karena semua memakai songkok, pakai pakaian biasa. Begitupun acara kedukaan orang meninggal, jika orang hindu yang meninggal proses kematian sampai selesai

pemakaman bukan orang hindu saja tapi dirumat bersama-sama, entah nanti yang menggali kuburan itu orang islam dan kristen bahkan hindu, begitupun dari islam ada yang meninggal dari umat hindu dan kristen juga membantu proses pemakamannya agar bisa segera dimakamkan, karena kita sendiri itu merasa besok saya juga mengalami seperti, begitupun makam silakan Siapa saja boleh di sana karena itu tempat pemakaman umum.” (Wawancara TD, 2025)

Argumen ini juga sejalan dengan pak STS:

“kalau semisal ada acara apapun baik diacara kegiatan masyarakat seperti ngaturi, kemudian acra pengajian dan lain-lain, tidak akan bisa membedakan mana yang agamanya kristen, hindu, islam semua sama karena memakai songkok”. (Wawancara STS, 2025)

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, seperti acara hajatan atau kenduri, semua warga juga diundang tanpa memandang agama. Mereka hadir dan membaur jadi satu.

“Kegiatan-kegiatan sosial itu pasti semua diundang...seandainya islam itu mendatangkan kiyai kita diundang hadir disana, kristen kalau mendatangkan pendeta kita hadir disana membaur jadi satu. Jadi kalau sudah membaur bahkan dari hindu, islam budha ga ada yang tau karena semua memakai songkok, pakai pakaian biasa.”. (wawancara Pak TD, 2025).

Fenomena penggunaan peci hitam (songkok) oleh warga lintas agama di Desa Balun dapat dianalisis menggunakan perspektif Interaksionisme Simbolik. Dalam konteks ini, peci hitam telah mengalami pergeseran makna (*shift of meaning*) atau desakralisasi simbol. Peci tidak lagi dimaknai secara eksklusif sebagai atribut keagamaan Islam, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol budaya dan identitas nasional yang inklusif. Hal ini sejalan dengan gagasan Soekarno yang mempopulerkan peci sebagai simbol nasionalisme Indonesia yang dapat dipakai oleh siapa saja (Hanafi, 2023). Di Desa Balun, peci berfungsi sebagai *social equalizer* (penyetara sosial) yang efektif untuk mengaburkan batas visual antara *in-group* (kelompok agama sendiri) dan *out-group* (kelompok agama lain), sehingga prasangka sosial dapat diredam karena secara visual mereka terlihat "sama".

2. Empati dan Toleransi Tanpa Diminta

Bahkan, ada bentuk penghormatan yang tumbuh secara alami tanpa perlu diminta. Pak TD memberikan contoh yang mengharukan saat ia merayakan nyepi dirumahnya. Warga sekitar yang non-hindu ternyata ikut menghormati dengan cara mereka sendiri.

“Contoh saja ya saya ini merayakan Nyepi... saya ngamati loh lampu jalan dan teras rumah orang-orang kok dimatikan, kami tidak minta mereka menghormati, biasanya muter HP atau muter lagu-lagu di radio, tetangga menghormati orang untuk melakukan ibadahnya ini mungkin sudah sampai tertera toleransinya”. (Wawancara Pak TD, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran Bersama untuk menjaga keseimbangan sosial melalui empati dan pengertian timbal balik (Handayani & Darodjat, 2024). Bentuk penyesuaian ini menjadimekanisme sosial yang menjaga keharmonisan tanpa perlu aturan tertulis. Sejalan dengan apa yang dikatakan Pak STS:

“kalau semisal ada natal, H-7 gereja sudah dijaga, tanpa meminta bantuan, semua ikut mengamankan, dari pihak islam, hindu, bahkan organisasi silat juga ikut, kalau saya tidak apa-apa yang penting tertib dan berjalan lancar.” (Wawancara Pak STS, 2025).

3. Musyawarah dan Pewarisan Nilai

Selain itu, wawancara dengan Pak STS menegaskan bahwa praktik kerukunan juga diwujudkan melalui kegiatan masyarakat desa.

“Kalau ada masalah antarwarga, gak pernah langsung dibawa ke polisi. Biasanya dibicarakan di balai desa. Semua tokoh agama ikut duduk bareng, cari solusi yang baik. Jadi gak pernah ada yang sampai ribut. Kita ini sudah paham kalau hidup berdampingan itu harus saling ngerti,” (Wawancara STS, 2025)

Musyawarah menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas sosial desa. Kehadiran perwakilan dari berbagai agama dalam forum tersebut menandakan bahwa kerukunan di balun bukan sekadar hasil toleransi yang pasif, tetapi kesadaran dimana setiap pihak terlibat dalam menjaga keseimbangan sosial (Mawardi dkk., 2024). Lebih lanjut, pewaris nilai kerukunan juga menjadi perhatian masyarakat Balun. Pak TD menjelaskan bahwa nilai toleransi mulai ditanamkan sejak anak-anak melalui lembaga Pendidikan yang inklusif dan interaksi sosial di lingkungan sekitar.

“Kalau anak kecil kan belum tahu betul soal toleransi, tapi dari TK sampai SD sudah campur, gurunya ngajari saling menghargai. Kalau ada kegiatan ya bareng-bareng. Kalau remaja ya kita kasih pemahaman tentang toleransi dan keharmonisan beragama,” (Wawancara TD, 2025)

Sementara pak STS tokoh agama Kristen, menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar nilai-nilai kerukunan tetap terjaga di Tengah arus modernisasi.

“Kami di gereja sudah membiasakan dari kecil sampai remaja untuk hidup rukun. Tapi tantangannya besar, karena anak-anak sekarang sudah dekat dengan teknologi. Jadi kami terus saling mengingatkan sesama pengurus agar tetap memberi contoh yang baik dan menjaga Balun tetap rukun,”. (Wawancara STS, 2025).

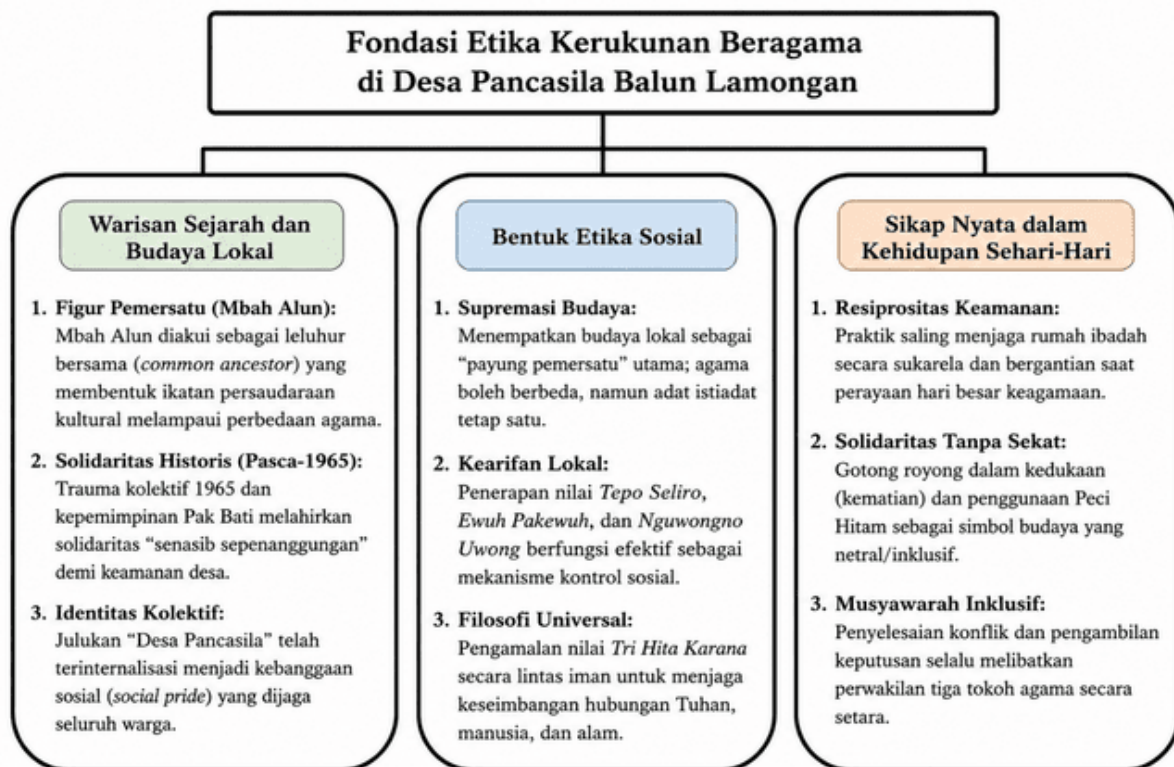
Pemaparan tersebut, enunjukkan bahwa Masyarakat balun tidak hanya menjaga harmoni dalam konteks sosial saat ini, tetapi juga menyiapkan mekanisme keberlanjutan nilai-nilai toleransi kepada generasi muda melalui Pendidikan moral dan keteladanan sosial. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerukunan di desa balun bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan sebuah kerukunan aktif yang diwujudkan dalam perbuatan nyata sehari-hari. Praktik ini berakar kuat pada kesadaran kolektif untuk saling berpartisipasi dan memberikan timbal balik, terutama dalam momen penting seperti perayaan hari besar keagamaan. Pola saling menjaga dimana emuda *non-* muslim mengamankan sholat idul fitri, idul adhah, dan pemuda non hindu mengamankan pawai ogoh-ogoh, dan pemuda *non-*Kristen mengamankan hari natal dari hari sebelum pelaksanaan dan selesai hari pelaksanaan hal ini menunjukkan adanya resiprositas yang tulus. Lebih jauh lagi, solidaritas mereka terbukti mampu melampaui batas agama, terutama dalam urusan kemasyarakatan seperti kedukaan atau hajatan, dimana semua warga hadir sebagai satu kesatuan Masyarakat balun. Penggunaan atribut yang sama menjadi simbol kekuatan dari kesetaraan.

4. Tinjauan Teoritis oleh *Contact Hypothesis* dan Modal Sosial

Praktik-praktik nyata ditemukan di desa balun ini sangat sejalan dengan beberapa pendapat, yaitu teori kontak (*contact hypothesis*) Allport dari penelitian Wahyuningsih dkk., (2025), yang mengatakan bahwa prasangka antar kelompok dapat dikurangi secara signifikan melalui interaksi langsung. Keberhasilan di Desa Balun ini sangat mencerminkan empat kondisi kunci yang disyaratkan Allport agar kontak berhasil. Pertama adanya status yang setara terlihat jelas Ketika semua warga membaur dalam hajatan atau kedukaan ataupun kegiatan sosial tanpa ada yang merasa lebih superior.

Kedua mereka memiliki tujuan bersama yang kuat seperti menyukseskan sedekah bumi atau keamanan hari raya agama lain. Ketiga adanya Kerjasama antar kelompok. Keempat otoritas dan norma sosial yang diciptakan oleh para pemimpin desa dan tokoh agama yang secara sadar meancang kegiatan Bersama (Rahmat Na'im & Sumayah, 2023).

Selain itu selaras dengan konsep modal sosial (*social capital*) Yarisetou (2009), yang merujuk pada kepercayaan, dan norma sebagai perekat Kerjasama Masyarakat. Desa balun memiliki modal sosial yang sangat tinggi, seperti jaringan antarwarga terjalin erat melalui berbagai kegiatan yang kemudian menumbuhkan kepercayaan. Hal ini tercermin dalam kegiatan apa pun: tidak perlu meminta, tapi semua hadir untuk membantu. Kepercayaan ini kemudian membentuk norma timbal balik (Sayuti dkk., 2024). Dengan demikian, modal sosial menjembatani perbedaan, yang berfungsi sebagai perekat sosial yang sangat efektif di balun.



Gambar 4. Peta Konsep Fondasi Etika Kerukunan Beragama
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fondasi etika kerukunan di Desa Balun terbentuk melalui proses historis yang panjang serta diperkaya oleh nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Mbah Alun bersama para tokoh masyarakat sejak masa awal menjadi landasan lahirnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya hidup berdampingan di tengah keberagaman. Berbagai peristiwa sejarah, seperti dinamika sosial pasca-1965 dan hadirnya agama Kristen serta Hindu pada tahun 1967, semakin menguatkan semangat toleransi, persaudaraan, dan nasionalisme masyarakat Balun. Seiring berjalannya waktu, warisan nilai tersebut terus diinternalisasikan sebagai pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Temuain ini menunjukkan bahwa harmoni sosial di Desa Balun bukanlah sesuatu

yang terbentuk secara instan, melainkan hasil perjalanan sejarah yang berpadu dengan kearifan lokal dan terus dipelihara oleh masyarakat.

Selanjutnya, etika sosial masyarakat Desa Balun berkembang melalui perpaduan nilai budaya, ajaran agama, dan pengalaman hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Nilai-nilai seperti *tepo seliro*, *ewuh pakewuh*, dan *guyub rukun* menjadi pedoman etnis yang mengarahkan perilaku masyarakat dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Proses internalisasi nilai tersebut tampak dalam sikap saling menghormati, kemampuan menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dengan kehidupan sosial, serta kesediaan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas perbedaan. Secara konseptual, temuan ini dapat dijelaskan melalui terori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, pendekatan *thick description* Clifford Geertz, serta nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, moralitas masyarakat Balun tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap norma, tetapi juga tumbuh dari kesadaran etis yang lahir melalui refleksi budaya, pengalaman sosial, dan nilai-nilai spiritual.

Lebih lanjut, implementasi etika kerukunan diwujudkan melalui berbagai praktik sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Keterlibatan warga dalam kegiatan seperti sedekah bumi, perayaan hari besar keagamaan, hingga saling membantu dalam prosesi pemakaman mencerminkan kuatnya solidaritas sosial yang telah mengakar. Praktik gotong royong tersebut sejalan dengan *contact hypothesis* Gordon Allport yang menekankan pentingnya interaksi positif antarkelompok, serta konsep *social capital* Robert Putnam yang menempatkan kepercayaan, kerja sama, dan jejaring sosial sebagai fondasi kohesi masyarakat. Oleh karena itu, Desa Balun dapat dipandang sebagai representasi nyata keberhasilan integrasi nilai sejarah, budaya, agama, dan Pancasila dalam membangun kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu studi kasus, yaitu Desa Balun, dengan penekanan pada kajian etika kerukunan dari perspektif historis dan sosial. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ke daerah multikultural lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda sehingga memungkinkan dilakukan pengujian terhadap konsistensi maupun pengembangan model etika kerukunan yang ditemukan dalam penelitian ini. Selain itu, kajian berikutnya juga disarankan untuk menelaah dinamika kerukunan antarumat beragama dari perspektif generasi muda, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustian, M. (2019). *Pendidikan Multikultural*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Alfariz, F. (2021). Analisis nilai religiusitas sebagai penguatan toleransi di desa pancasila lamongan jawa timur. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 118–123.
- Alfian, Y. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT DI DESA CIHARASHAS

- KABUPATEN BANDUNG BARAT. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 59–69.
- Amani, N., Prasetya, R. Y., Elmira, A., & Rahman, A. H. (2024). Dinamika Pluralisme Agama Dalam Masyarakat Kontemporer. *RELIGI: Jurnal Studi Agama-Agama*, 20(1), 54–70.
- Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). KERAGAMAN BUDAYA INDONESIA SUMBER INSPIRASI INOVASI INDUSTRI KREATIF. *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 1, 292–301.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Dewayani, S. (2017). *Suara dari marjin*. Rosda.
- Fraulen, A., Putri, D. S., Yuanita, R. R., & Fitriono, R. A. (2022). PENTINGNYA PERAN PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP GENERASI Z. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 4(01), 21–28.
- Gani, A., Oktavani, M., & Suhartono, S. (2024). Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spiritualitas Bangsa. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 289–297.
- Hanafi, H. (2023). Studi “Melek Pancasila” berbasis toleransi tri kerukunan umat beragama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(11), 1229–1236. <https://doi.org/10.17977/um063v3i11p1229-1236>
- Handayani, W., & Darodjat, D. (2024). Membangun kecerdasan sosial melalui pembelajaran bahasa: Suatu tinjauan filsafat. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(9), 377–388.
- Hermawan, A. (2016). MENELADANI NILAI AJARAN DAKWAH SUNAN KALIJAGA DALAM MENDIDIK KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISAS. *ATTARBIYAH*, 26(0), 338–378. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v26i0.338-378>
- Huda, S. (2022). *Moderasi Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal dari Balun untuk Indonesia Berkedamaian*. Samudra Biru.
- Kebingin, B. Y., Keban, Y. B., & Sihombing, A. A. (2024). LOCAL WISDOM MASYARAKAT FLORES TIMUR SEBAGAI PILAR TOLERANSI BERAGAMA. *Harmoni*, 23(2), 207–228. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i2.754>
- Leavy, P. (2022). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. Guilford publications.
- Malau, T. W. (2024). Dialog antaragama dan kontribusi tokoh agama dalam penyelesaian konflik dan implementasinya untuk memperkuat toleransi. *Jurnal Magistra*, 2(1), 01–18.

- Malik, A. N. R., Ferdila, J., Haqni, C. Z., Fadila, I. N., & Putri, A. P. (2024). Implementasi Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, 2(2)*, 278–291.
- Mawardi, M. F., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Gotong Royong Sebagai Fondasi Moral Budaya: Perspektif Hukum Dan Keharmonisan Sosial. *Prosiding Mimbar Justitia, 1(1)*, 207–232.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. *(No Title)*.
- Ola, M. I. D., & Keban, Y. B. (2023). Tradisi Gemohing Lamaholot Sebagai Emblem Pemersatu Masyarakat Multikultural Di Desa Tuwagoetobi. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 6(2)*, 339–351.
- Qolby, H. R., & Kholifah, A. (2025). Urgensi Moderasi Agama di Era Globalisasi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(01)*, 1013–1022.
- Rahmat Na'im, M., & Sumayah, M. (2023). *RACISM REFLECTED IN BLACKKKLANSMAN MOVIE (2018): ALLPORT'S SCALE OF PREJUDICE AND CONTACT HYPOTHESIS THEORY*.
- Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *International Journal of Demos, 3(1)*, 43–52.
- Rizal, D. A., & Kharis, A. (2022). Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Komunitas, 13(1)*, 34–52.
- Rozi, F., & Utomo, D. M. B. (2019). Budaya Pluralisme dalam Penerimaan Masyarakat Desa Balun, Kabupaten Lamongan: Pluralism Culture in Community Reception Balun Village, Lamongan Regency. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(1)*, 11–15. <https://doi.org/10.21070/kanal.v8i1.212>
- Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadi, A. P. (2024). Modal Sosial dan Pembangunan Masyarakat. *Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia*.
- Setiabudi, W., Paskarina, C., & Wibowo, H. (2022). Intoleransi di tengah toleransi kehidupan beragama generasi muda Indonesia. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, 7(1)*, 51–64.
- Sigiro, E. L. (2018). *Pengaruh Interaksi Sosial dan Peran Gender Terhadap Pertimbangan Moral Siswa SMS Negeri 12 Medan*.
- Sihombing, L. H., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Batubara, D. K., Siahaan, H. T. B., & Togatorop, R. F. (2024). Penerapan Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai KeTuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia dalam Perspektif Toleransi Beragama. *SELAMI IPS, 17(1)*, 44–54.
- Sugiyono, M. (2008). Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.

- Surya, M., & Efendi, E. (2025). Planning FKUB Dalam Mewujudkan Kerukunan Ummat Pasca Konflik Keagamaan Di Kota Tanjung Balai Tahun 2016. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 15(2)*, 381–404.
- Susi, S., Khair, O. I., Firmansyah, J. P., Salman, A., & Raharjo, J. S. (2024). Kepemimpinan Nasional yang Berjiwa Pancasila: Investasi Masa Depan Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues, 4(1)*, 695–703. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i1.1964>
- Wahyuddin, I., Utomo, A. H., Alfari, F., Cahyono, F., & Ashari, A. (2022). Moderasi Beragama untuk Generasi Milenial Pancasila: Studi Kasus MI Tarbiyatus Sibyan di Desa “Pancasila” Balun, Turi, Lamongan. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 14(1)*, 1–21. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.588>
- Wahyuningsih, D., Aji, B., & Budiyo, A. (2025). *Penguatan Re-AKSI (Religiositas dan Kontak Sosial): Intervensi Stigma terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Melalui Pendekatan Religiositas dan Kontak Sosial*. CV Eureka Media Aksara.
- Winy, F. B. (2025). PERAN HUKUM ADAT SAMAWA SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI PULAU SUMBAWA. *Legal System Journal, 2(1)*, 37–44.
- Yarisetou, W. (2009). *Tiaitiki: Konsep dan praktek*. Kerjasama Penerbit Arika dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura.